

KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

Chania Rahmah^{1*}, Zahrotunnur Rumondang Pakpahan¹, Ilham Candra Syawaludin¹,
Elkana Maruli Sihombing¹, Farah Alfia Anandirza¹, Dara Melinda¹, Ruth Mentari
Simbolon¹, Gysheila Batya¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryachudu Jati Agung, Lampung Selatan,
Indonesia

*Corresponding e-mail: chania.mr@pwk.itera.ac.id

DOI : 10.35472/jppk.v5i2.2137

ABSTRACT

Urban growth often leads to various issues, one of which is slum problems. This study identifies the characteristics of slum settlements in the coastal area of Bandar Lampung City, with the aim of understanding the physical and non-physical conditions that influence slum development. The slum settlements in the coastal area emerged due to geographic, social, economic factors, and non-compliance with regulations, making them vulnerable to natural disasters. The method used is qualitative descriptive, with data collection through observation and questionnaires. The results indicate that the slum settlements are divided into two types: those located on land and those standing above the sea. The infrastructure conditions in these slum areas are very poor, including irregular building structures, non-compliance with technical standards, and deficiencies in waste water management, garbage collection, and fire protection. The socio-economic aspects of the community also show low levels of welfare, with the majority of the population working in the informal sector. This research is expected to contribute to the formulation of strategies for addressing slum settlements in the coastal area of Bandar Lampung.

Kata Kunci: Slum, Coastal Area, Housing Typology

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota tidak jarang menimbulkan permasalahan salah satunya permasalahan kumuh. Permasalahan permukiman kumuh sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena banyak terjadi pada berbagai kota seperti kota besar, kota sedang, maupun kota kecil. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU (Kementrian PUPR, 2016). Program tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelesaian dari 35.291 Ha permukiman kumuh di seluruh Indonesia dengan target 0 % kumuh namun program KOTAKU kemudian dihentikan pada 30 Juni tahun 2023 (Yulia et al., 2024). Bentuk intervensi lain pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Perumahan memfasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) bagi pemerintah daerah (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Sementara itu, intervensi dari sisi kebijakan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Dokumen tersebut menjadi acuan pemerintah daerah kota atau kabupaten untuk membuat strategi pencegahan dan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman kumuh yang ada.

Kota Bandar Lampung juga tidak terhindarkan dari permasalahan kumuh. Lokasi permukiman kumuh tersebar di berbagai kecamatan. Pertumbuhan permukiman kumuh

dipicu oleh berbagai faktor seperti faktor fisik, faktor sosial, ekonomi dan budaya, pendapatan, jenis pekerjaan, serta faktor *extended family system* (Fitri, 2020). Permukiman kumuh sebagai bentuk informalitas kota muncul di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Hal ini memicu hilangnya sebagian besar kawasan pesisir Kota Bandar Lampung akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman. Tumbuhnya permukiman kumuh di kawasan pesisir pada Kota Bandar Lampung ini dapat dijumpai di pesisir Kecamatan Bumi Waras tepatnya di Kecamatan Kangkung ataupun Bumi Waras.

Permukiman kumuh di kawasan pesisir adalah sebuah kasus yang memerlukan penanganan khusus. Permukiman kumuh ini merupakan kawasan yang rentan (Maharani & Umilia, 2014). Infrastruktur yang tidak memadai dan juga lokasi yang dekat dengan gelombang laut menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, kawasan pesisir yang juga berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan pantai melarang adanya bangunan disepanjang kawasan pesisir sejauh 100 m. Oleh karena itu, sebagian besar permukiman kumuh di kawasan pesisir juga termasuk kawasan ilegal atau *squatter*. Berdasarkan peraturan SE Dirjen Cipta Karya Nomor 30 SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (2020), kawasan kumuh yang ilegal baik yang berstatus kumuh ringan ataupun berat tidak dapat dibangun infrastruktur melainkan perlu relokasi.

Identifikasi karakteristik kekumuhan menjadi penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam penanganan kumuh kawasan pesisir. Beberapa indikator kumuh yang bersifat resmi terkadang belum dapat menjelaskan secara detail kondisi kumuh sehingga perlu pendekatan yang menyeluruh dalam identifikasi karakteristik kumuh (Krishna et al., 2014). Hal ini ditunjukkan dengan pendekatan kuantitatif yang sering digambarkan dengan pemberian skor pada proses penilaian indikator kumuh. Skoring akan sangat baik untuk menentukan tingkat kekumuhan tapi tidak bisa menggambarkan secara aktual kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh pada kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

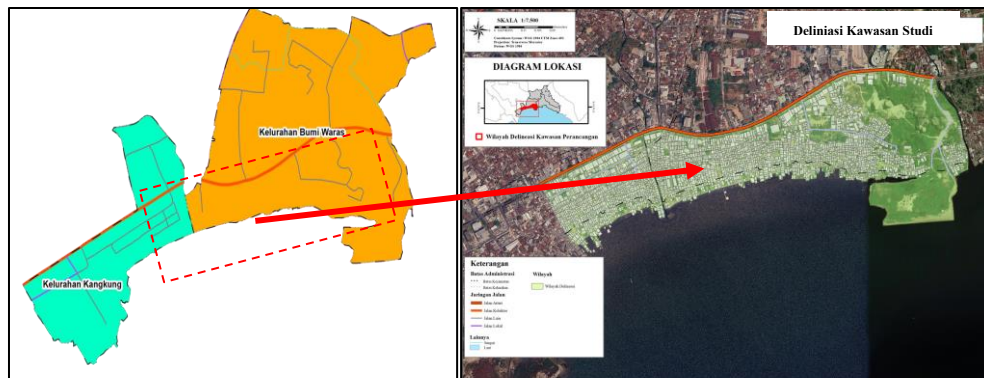
B. METODE PENELITIAN

1. Deliniasi Kawasan Studi

Kawasan studi permukiman pesisir Kota Bandar Lampung berada di Kecamatan Bumi Waras, mencakup sebagian Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Bumi Waras. Luas kawasan studi mencakup 59 Hektar area. Secara historis, pada tahun 2008 sebagian kawasan pesisir Kota Bandar Lampung ini sempat ditimbun untuk dibangun tempat wisata namun terjadi mangkrak. Adapun Deliniasi Kawasan Studi ditunjukkan oleh Gambar 1.

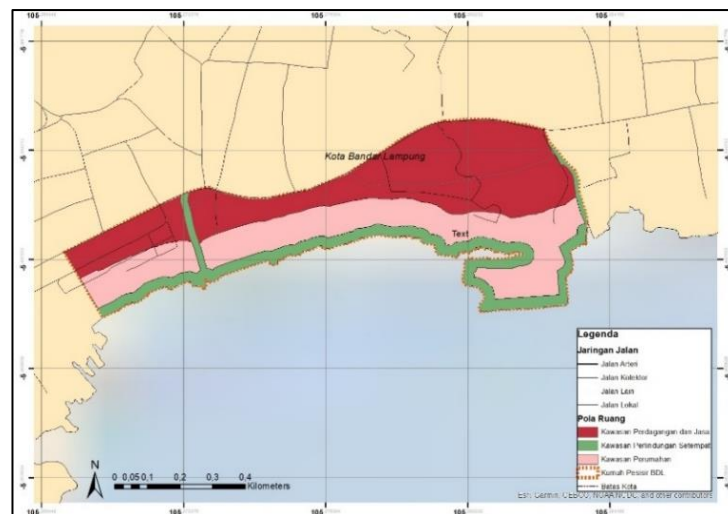
Berdasarkan keterangan masyarakat, kawasan ini berkembang dihuni oleh pendatang yang mana berasal dari Pulau Jawa dan bekerja sebagai kuli. Kawasan ini kemudian berkembang sebagai permukiman yang masif terutama setelah Kecamatan Bumi Waras dipecah dari Kecamatan Teluk Betung Selatan di tahun 2012. Seiring perkembangannya masyarakat membuang sampah di pantai sehingga sampah menumpuk di sepanjang pesisir hingga menutupi pasir laut.

Berdasarkan arahan rencana pola ruang RTRW Kota Bandar Lampung sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2, Kawasan studi terbagi menjadi beberapa rencana pola ruang yaitu kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan perlindungan setempat. Kawasan perdagangan dan jasa berada pada koridor jalan arteri. Sementara itu, kawasan permukiman berada ditepian pesisir dan sebagian besar kawasan perlindungan setempat.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Delineasi Kawasan Studi



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung (2025); Penulis (2025), diolah menggunakan ArcGIS

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang di Kawasan Studi berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam proses mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh, analisis yang diterapkan dalam analisis adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada deskripsi sejumlah variabel yang berhubungan dengan unit penelitian dan tidak membahas hubungan antar variabel (Samsu, 2021;

Syahrizal & Jailani, 2023). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data data yang ada pada lokasi penelitian dan menggambarkan karakteristik permukiman kumuh sebagaimana adanya pada kondisi lapangan.

Kawasan kumuh pada Kecamatan Bumi Waras sebenarnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 165/IV.01/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung. Penentuan SK Kumuh dilakukan dengan menghitung skor kekumuhan secara kuantitatif. Akan tetapi, dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara mendalam tentang karakteristik kumuh yang ada di Kecamatan Bumi Waras berdasarkan fakta yang terobservasi dan informasi yang diperoleh dari kuesioner, dengan pendekatan yang rasional dan objektif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan interpretasi mendalam terhadap data yang terkumpul, disajikan secara sistematis, faktual, dan cermat. Dengan demikian, hasil analisis dapat menggambarkan karakteristik kawasan kumuh di Pesisir Kecamatan Bumi Waras. Selanjutnya, data yang diperoleh dari kuesioner terstruktur akan dianalisis secara kuantitatif, diolah dalam bentuk persentase untuk menggambarkan distribusi karakteristik yang menjadi fokus penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi kumuh di kawasan tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner dan observasi. Kuesioner diajukan pada 39 responden yang tersebar merata pada wilayah delineasi seluas 59 Ha. Jumlah responden telah disesuaikan dengan segmen lokasi yang kecil dan spesifik. Menurut Sekaran (2003) untuk penelitian survei dapat digunakan 30-50 responden untuk kawasan yang lebih kecil atau spesifik.

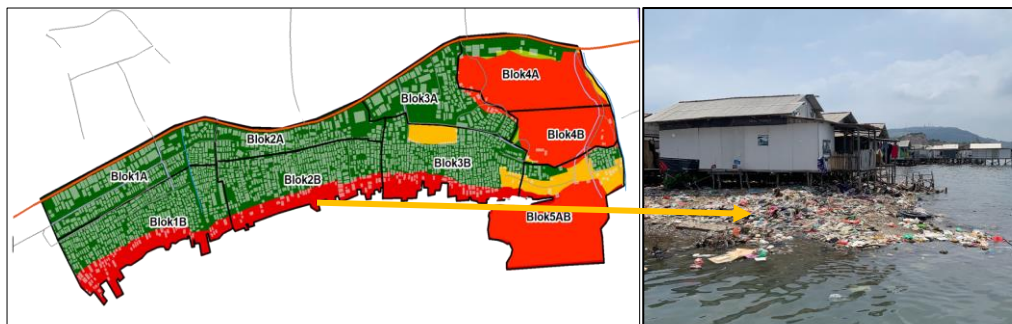
Metode ini diterapkan untuk menjelaskan variabel variabel permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30 SE/DC/2020, yaitu :

1. Tipologi perumahan dan permukiman kumuh
2. Kondisi Bangunan Gedung
3. Kondisi Jalan Lingkungan
4. Kondisi Penyediaan Air Minum
5. Kondisi Drainase Lingkungan
6. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
7. Kondisi Pengelolaan Persampahan
8. Kondisi Proteksi Kebakaran
9. Nilai Strategis Lokasi
10. Kependudukan
11. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya
12. Legalitas
13. Kesesuaian Rencana Tata Ruang

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Permukiman Kumuh

Berdasarkan kondisi geografis dan fisik kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, dapat diidentifikasi tipologi permukiman kumuh. Permukiman yang tumbuh di Kecamatan Bumi Waras ini sebagian besar berada di daratan dan sebagian berada di tepi hingga atas badan air laut. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3 yang menunjukkan kondisi kawasan kumuh di lokasi studi, area berwarna hijau merupakan kawasan permukiman dan area berwarna merah merupakan kawasan yang dibangun di atas badan air laut.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 3. Tipologi Kawasan Kumuh Pesisir Kota Bandar Lampung berdasarkan Hasil Observasi

Berdasarkan karakteristik geografis, kawasan permukiman yang berdiri di daratan atau yang berwarna hijau pada Gambar 3, tidak memiliki ciri kekumuhan. Kawasan berwarna hijau yang berada tepat ditepi jalan utama merupakan kawasan perdagangan jasa yang cukup maju, ditambah keberadaan pusat perbelanjaan baru yaitu *Lampung City Mall*. Kawasan permukiman kumuh muncul tepat disepanjang bibir pantai hingga badan air. Sementara, tidak jauh dari lokasi tersebut permukiman kumuh yang tumbuh di sepanjang kawasan pesisir Kecamatan Bumi Waras. Kawasan kumuh ini dapat dikategorikan dalam tipologi kumuh diatas badan air. Sebagian besar rumah pada permukiman kumuh merupakan rumah panggung yang berdiri diatas air laut dan tumpukan sampah.

2. Kondisi Bangunan dan Gedung

Kondisi bangunan dan gedung dapat dijelaskan dalam beberapa kategori yaitu Ketidakteraturan Bangunan, Kepadatan Bangunan, dan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan. Bangunan yang berdiri pada badan air berdiri secara organik tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Dari sisi kepadatan bangunan juga sangat padat yang dibuktikan dengan dekatnya jarak antar bangunan pada kawasan permukiman. Berikut merupakan Gambar 4 yang menunjukkan Kondisi Bangunan dan Gedung di lokasi studi.

Sementara itu, untuk kondisi persyaratan teknis bangunan yaitu berdasarkan luas bangunan dan penghuni serta spesifikasi material bangunan juga tidak memenuhi syarat. Ukuran rumah tidak ideal untuk jumlah penghuni dan juga material bangunan terdiri dari material kayu untuk dinding dan lantai, serta asbes untuk dinding.

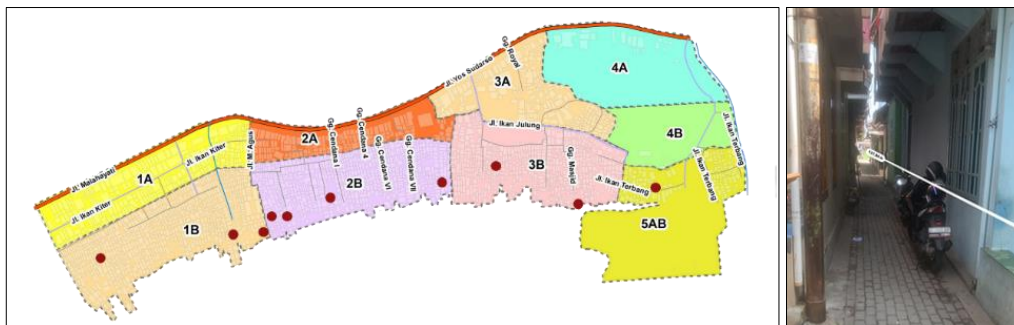


Sumber: Penulis (2025)

Gambar 4. Kondisi Bangunan dan Gedung berdasarkan Hasil Observasi

3. Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk sirkulasi jalan, terdapat Jalan Arteri Primer yang berada di Jalan Laksamana Malahayati dan Jalan Jenderal Yos Sudarso dimana kawasan koridor jalan diisi dengan kawasan perdagangan. Kemudian terdapat jalan lokal yang berada pada Jalan Ikan Kiter dan Jalan lingkungan yang berada di seluruh kawasan perancangan di area permukiman. Sementara itu, untuk jalan lingkungan lebarnya kurang dari 1,5 meter terutama untuk permukiman kumuh yang berada di badan air. Berikut merupakan Gambar 5 yang menunjukkan Kondisi Jalan di lokasi studi.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 5. Titik Kerusakan Jalan dan Penampang Lebar Jalan Lingkungan berdasarkan Hasil Observasi

4. Kondisi Penyediaan Air Minum

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, sebanyak 41,7% responden menyatakan telah dilayani oleh penyediaan air secara tidak langsung dari pihak PDAM, namun masih terdapat 58,3% responden yang masih menggunakan sumur bor ataupun membeli air minum kepada penjual air minum di sekitar kawasan. Berikut merupakan Gambar 6 yang menunjukkan Kondisi Sarana Penyediaan Air Minum di lokasi studi.

5. Kondisi Drainase Lingkungan

Drainase di kawasan ini diarahkan untuk menggunakan tipe tertutup di seluruh area guna meningkatkan efisiensi aliran air dan meminimalkan risiko genangan. Pada jalan-jalan utama atau arteri serta jalan lokal, akan diterapkan drainase tipe primer yang memiliki kapasitas lebih besar untuk menampung dan mengalirkan volume air yang signifikan dari

area tersebut. Sementara itu, untuk kawasan permukiman yang lebih kecil atau mikro, digunakan drainase tipe tersier yang dirancang agar dapat menangani limpasan air skala kecil dari area-area rumah tangga. Untuk kawasan permukiman kumuh yang berada di atas badan air, sarana drainase tidak ditemukan. Pada kawasan ini, air limpasan langsung jatuh ke laut.

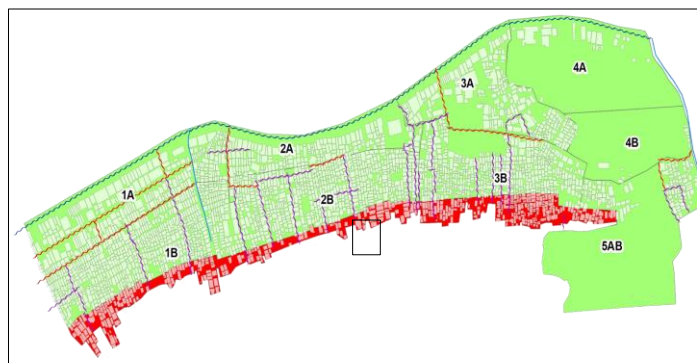


Sumber: Penulis (2025)

Gambar 6. Sarana Penyediaan Air Minum berdasarkan Hasil Observasi

6. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat dua kondisi pengolahan air limbah, khususnya terkait *black water* yang ada di lokasi studi, dimana terdapat kawasan permukiman yang masih belum dilengkapi dengan sarana air limbah individu berupa *septic tank* pada kawasan pesisir pantai. Akan tetapi, untuk kawasan permukiman yang berada pada badan air tidak memiliki *septic tank*. Delineasi penggunaan *septic tank* ditunjukkan pada Gambar 7 yang menunjukkan Sebaran Penggunaan *Septic Tank*, dimana kawasan hijau adalah permukiman yang dilengkapi *septic tank* dan kawasan merah tidak.

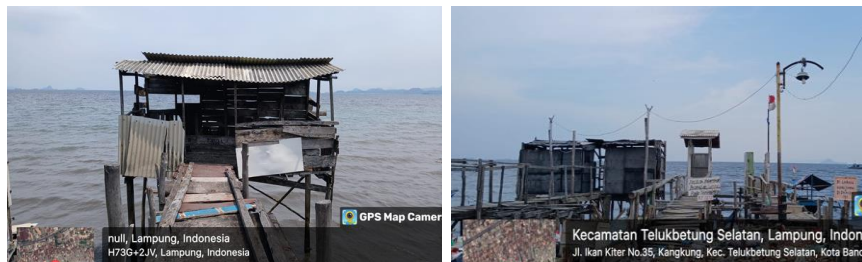


Sumber: Penulis (2025)

Gambar 7. Peta Penggunaan *Septic Tank* berdasarkan Hasil Observasi

Pada pengamatan langsung di kawasan pesisir, ditemukan bahwa pengolahan air limbah berupa *grey water* dari aktivitas rumah tangga mengarah langsung ke pembuangan drainase, sedangkan untuk pengolahan limbah *black water*, di kawasan delineasi sebagian besar menggunakan sistem pembuangan secara on site berupa penyediaan *septic tank* di

tiap persil pada kawasan permukiman, namun ditemukan bahwa masih adanya perilaku Buang Air Besar-Sembarangan (BAB-S) di kawasan pesisir dimana limbah yang dibuang tidak mengarah untuk dikumpulkan dalam *septic tank*, melainkan langsung dibuang ke laut menggunakan jamban komunal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kawasan permukiman yang belum memiliki pengolahan air limbah yang optimal dan memadai dan dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan dari masyarakat di kawasan tersebut. Berikut merupakan Gambar 8 yang menunjukkan Kondisi Toilet Umum di lokasi studi.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 8. Kondisi Toilet Umum berdasarkan Hasil Observasi

7. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Pada hasil pengamatan dan juga wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, ditemukan bahwa terdapat 16,7% masyarakat menggunakan jasa angkutan sampah, 38,9% mengolah sampah yang dihasilkan dengan cara dibakar, 2,8% masyarakat mengubur sampahnya secara langsung, dan 41,7% lainnya menggunakan cara lain (seperti langsung dibuang ke laut). Selain itu, tidak ditemukan adanya lokasi tempat penampungan sampah sementara. Berikut merupakan Gambar 9 yang menunjukkan Kondisi Pembuangan Sampah di lokasi studi.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 9. Kondisi Pembuangan Sampah berdasarkan Hasil Observasi

8. Kondisi Proteksi Kebakaran

Sebagai kawasan berkepadatan tinggi dan kondisi bangunan yang berbahan kayu, permukiman kumuh pada kawasan pesisir rentan terhadap kebakaran. Berdasarkan indikator kekumuhan, kawasan kumuh pesisir Kota Bandar Lampung tidak dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran. Jalanan yang sempit juga dapat meningkatkan risiko kebakaran pada permukiman kumuh.

9. Nilai Strategis Lokasi

Lokasi permukiman kumuh dalam studi ini berada di Kecamatan Bumi Waras tepatnya pada Kelurahan Kangkung dan Bumi Waras. Kawasan ini dilalui dengan jalan arteri primer yaitu Jalan Laksamana Malahayati dan Jalan Jenderal Yos Sudarso dimana pada jalan utama ini terdapat kawasan perdagangan jasa. *Point of Interest* pada kawasan ini meliputi keberadaan Lampung City Mall yang terintegrasi dengan Hotel Santika dan The Bay Apartement. Selain kawasan perdagangan, nilai strategis kawasan ini juga ditunjukkan dari adanya Rumah Sakit Budi Medika dan lokasi rekreasi yaitu Pantai Gunung Kunyit.

10. Kependudukan

Kondisi kepadatan penduduk secara umum pada Kelurahan Kangkung yang berada di badan air mencapai 361 Jiwa/Ha dan dapat dikatakan Kategori Padat. Sementara itu, Kelurahan Bumi Waras memiliki kepadatan 174 Jiwa/Ha dengan Kategori Sedang.

11. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya

Dari aspek non fisik berupa kondisi sosial, ekonomi dan budaya informasi didapatkan berdasarkan hasil survei. Menurut data kuesioner, rata rata masyarakat dari 39 responden Memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang 60,4% dan 39,6% nya adalah non pedagang dengan rata-rata adalah Wiraswasta. Kebanyakan dari masyarakat yang bermukim adalah pendatang dari luar Lampung.

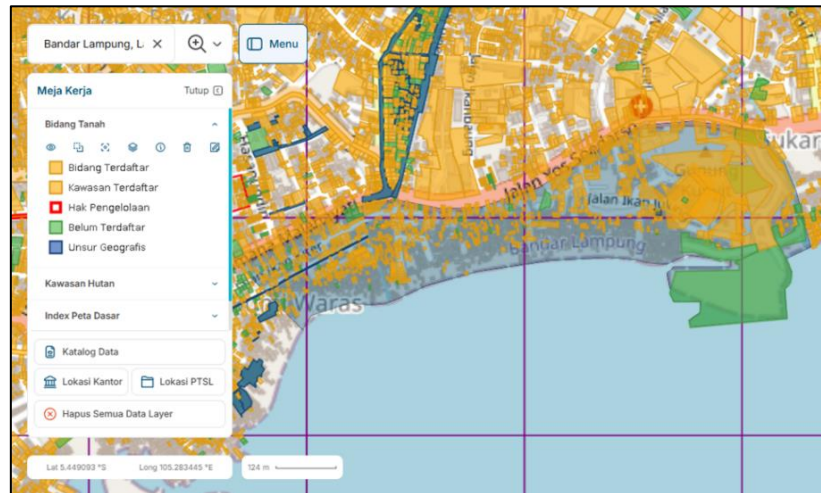
Selain itu, analisis kriminalitas di suatu daerah bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola serta penyebab terjadinya kejahatan. Dengan mempelajari data kriminal, seperti jenis kejahatan, waktu, dan lokasi kejadian, pihak berwenang dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam alokasi sumber daya yang tepat, meningkatkan keamanan masyarakat, dan memfasilitasi kerjasama antara pihak kepolisian dan komunitas. Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan bahwa kriminalitas yang terjadi di Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Bumi Waras meliputi tawuran, narkoba dan pencurian.

12. Legalitas

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang dapat diakses pada *website* bhumi.atrbpn.go.id diketahui bahwa sebagian besar rumah dan lahan di pesisir Kota Bandar Lampung tidak memiliki kepemilikan. Hal ini memang wajar terjadi karena kawasan tersebut masuk dalam kawasan perlindungan setempat dan tidak dapat dimiliki secara pribadi. Berikut merupakan Gambar 10 yang menunjukkan Informasi Legalitas Tanah di lokasi studi.

Akan tetapi, berdasarkan pada temuan lapangan baik di Kelurahan Kangkung maupun Kelurahan Bumi Waras diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di bagian darat telah memiliki izin mendirikan bangunan yang didapatkan melalui program kerja pemerintah berupa pemberian sertifikat rumah (PRONA) pada sekitar tahun 2019. Selain itu pemerintah kota juga turut memberikan izin kepada masyarakat setempat dengan memberikan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelumnya, seperti masyarakat yang tinggal berbatasan langsung dengan laut kurang dari 10 tahun hanya mendapatkan tinggal dari ketua RT setempat tanpa memiliki status kepemilikan tanah yang resmi.

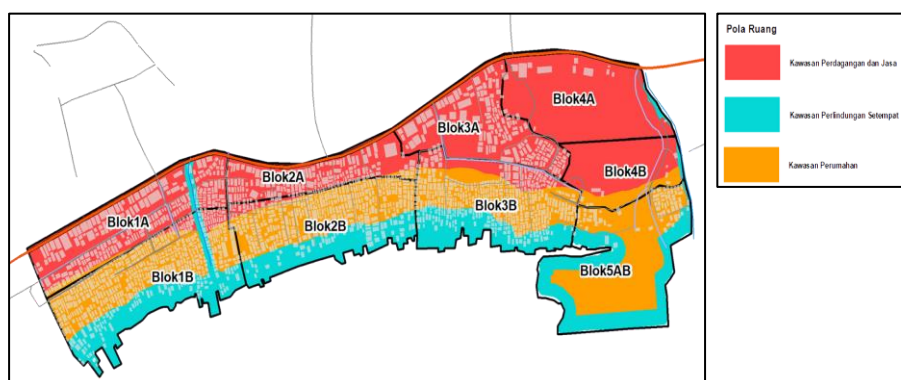
Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di sempadan pantai ataupun di atas pantai sampai saat ini tidak memiliki izin yang resmi untuk mendirikan bangunan.



Sumber: *bhumi.atrbpn.go.id* (2025)
Gambar 10. Informasi Legalitas Tanah

13. Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pernah menangani pelanggaran zona sempadan pantai, masyarakat kembali melanggar hingga saat ini. Pemerintah juga cukup sering datang pada wilayah tersebut, tetapi hanya untuk melihat kondisi dari pantai nya saja, bukan untuk mengatasi adanya pelanggaran zona sempadan pantai.



Sumber: *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung* (2025); Penulis (2025), diolah menggunakan ArcGIS

Gambar 11. Peta Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Gambar 10, diketahui bahwa pada kawasan perlindungan setempat terdapat banyak persil bangunan permukiman. Selain itu pada kawasan perdagangan dan jasa juga banyak ditempati oleh masyarakat untuk bermukim. Berdasarkan pengolahan data spasial maka simpangan pelanggaran tata ruang terjadi sebesar 14,6%.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui karakteristik permukiman kumuh kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Pada kawasan studi terdapat dua jenis permukiman secara umum. Permukiman yang berdiri di daratan dan permukiman yang berdiri pada kawasan sempadan pantai hingga badan air. Kawasan permukiman kumuh teridentifikasi berada pada kawasan sempadan pantai dengan tipologi kumuh pada badan air. Karakteristik kumuh ini juga telah diidentifikasi berdasarkan aspek fisik dan non fisik. Dari sisi kondisi aspek fisik dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di kawasan kumuh tidak memadai mulai dari kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran.

Sementara itu, dari sisi aspek non fisik kawasan ini berada dekat dengan kawasan perdagangan dan jasa yang sedang bertumbuh. Akan tetapi, permukiman kumuh terus bertumbuh diatas tanah yang tidak berizin. Kondisi ini mempersulit intervensi pemerintah dari sisi pembangunan fisik. Isu sosial lainnya adalah masyarakat pendatang yang bermukim juga merupakan pekerja di sektor informal dengan kondisi ekonomi yang sulit dan isu kriminalitas yang terjadi di kawasan tersebut.

Berdasarkan karakteristik keumuhan yang telah diidentifikasi diketahui perlunya peran dan komitmen pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kekumuhan baru pada kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Analisis lebih rinci dapat dilakukan dengan melakukan penilaian berdasarkan data *by name by address* sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30 SE/DC/2020. Hal ini diperlukan karena sebagai suatu kota yang terus berkembang permasalahan informalitas yaitu permukiman kumuh harus ditangani untuk mencegah luasan kumuh baru dan penataan kota untuk citra kota yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitri, D. A. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Universitas Negeri Surabaya*.
- [2] Kementerian Pekerjaan Umum. (2025, January 10). *Panduan Kebijakan dan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu*. <https://klop.pu.go.id/knowledge/panduan-dak-tematik-ppkt>
- [3] Krishna, A., Sriram, M. S., & Prakash, P. (2014). Slum types and adaptation strategies: identifying policy-relevant differences in Bangalore. *Environment and Urbanization*, 26(2), 568–585. <https://doi.org/10.1177/0956247814537958>
- [4] Maharani, L. A., & Umilia, E. (2014). Tipologi Permukiman Kumuh di Pinggiran Selatan Kota Surabaya. *Jurnal Teknik POMITS*, 3.
- [5] Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Pub. L. No. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 (2020).
- [6] Samsu. (2021). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Rusminin & Murjoko, Eds.; II). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- [7] Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (4th ed.). John Willey and Sons.

- [8] Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Pub. L. No. 40/SE/DC/2016 (2016).
- [9] Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humanoira*, 1.
- [10] Yulia, F., Istijono, B., & Hidayat, B. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Permukiman Kumuh Di Kota Padang (Studi Kasus : Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh). *Jurnal Niara*, 3(16), 642–651.